

Berstatus Tersangka, Wamenkumham Diperiksa KPK sebagai Saksi Hari Ini

JAKARTA (IM) - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, akan menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Senin (4/12).

Eddy Hiariej yang sudah menyabdang status tersangka akan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus korupsi untuk tersangka lainnya.

"Iya betul informasi yang kami peroleh untuk hadir dengan kapasitas sebagai saksi dalam berkas perkara tersangka lain Senin besok (4/12)," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada detikcom, Minggu (3/12).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengatakan kasus dugaan gratifikasi dengan terlapor Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sudah naik ke tahap penyidikan. Ada 4 tersangka dalam kasus ini. Alex mengatakan surat perintah penyidikan telah ditandatangani sekitar 2 pekan yang lalu. Alex mengatakan 3 tersangka sebagai penerima dan 1 tersangka sebagai pemberi.

"Kemudian, penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Asep, sekitar 2 minggu yang lalu dengan empat orang tersangka, dari pihak penerima tiga, dan pemberi satu. Itu. Clear, kayaknya sudah ditulis di majalah Tempo," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers, Kamis (9/11).

Eddy Hiariej menjadi salah satu yang ikut ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu pada Selasa (28/11) juga telah menyebutkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kasus Eddy sudah dikirimkan.

"Kemudian SPDP kalau nggak salah sudah kami tandatangi dan sudah dikirimkan," kata Asep kepada wartawan.

Asep mengatakan KPK akan memanggil Eddy untuk diperiksa sebagai tersangka dalam waktu dekat. Kendati demikian, Asep enggan menjelaskan detail kapan pemanggilan itu akan dilakukan. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



GANJAR HADIRI PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL DI LOMBOK

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) berdialog dengan penyandang disabilitas saat peringatan Hari Disabilitas Internasional di Mataram, NTB, Minggu (3/12). Ganjar mengunjungi warga disabilitas di Mataram untuk mendengar aspirasi dan menyampaikan program unggulan terkait penyandang disabilitas yang lebih berdaya dengan tersedianya akses pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan sekolah inklusif, peningkatan kuantitas dan kualitas SLB serta menyediakan beasiswa khusus bagi warga disabilitas.

Menegangkan, Kelompok KKB Papua Kian Terpojok, Warga Dijadikan Tameng

Pasukan TNI berhasil menggagalkan kelompok separatis teroris, Organisasi Papua Merdeka, mengibarkan bendera bintang kejora.

MAYBRAT (IM) - Satgas TNI dari Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok separatis teroris, Organisasi Papua Merdeka, di Kampung Ayata, Kabupaten Maybrat.

Ratusan warga berhasil dievakuasi pasukan TNI untuk menghindari intimidasi kelompok kriminal bersenjata

(KKB) teroris s ke tempat aman.

Satgas yang dipimpin Dansatgas Letkol Infanteri Andika Ganesha Sakti berhasil menggagalkan upaya pengibaran bendera bintang kejora oleh kelompok separatis teroris Organisasi Papua Merdeka di Dusun Aimasama Lama, Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah.

Aksi KSTP itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Manifesto Politik Papua Merdeka 1 Desember.

Sempat terjadi baku tembak antara KSTP dengan Satgas TNI, saat aparat hendak menggagalkan upaya pengibaran Bendera Bintang Kejora tersebut.

KSTP yang terdesak kemudian melakukan intimidasi terhadap warga untuk menjadikan warga sebagai tameng dalam baku tembak tersebut. Pasukan Satgas TNI langsung bertindak dengan menyelamatkan penduduk kampung untuk menghindari

jatuh korban jiwa.

Pergerakan tempur Satgas TNI berhasil memukul mundur KSTP yang melarikan diri ke arah hutan dan perbukitan, di mana dari hasil pantauan drone, KSTP berjumlah delapan orang dipimpin Manfred Fatem tersebut membawa beberapa pekok senjata api.

"Dari hasil penyelidikan aparat ditemukan rencana KSTP selain mengibarkan bendera bintang kejora, juga menyusun rencana untuk menyerang aparat keamanan dan melakukan aksi teror menggangu kenyamanan dan kedamaian masyarakat setempat," ujar Letkol Infanteri Andika Ganesha Sakti, Minggu (3/12).

Menurut Letkol Andika, situasi keamanan di Kampung

ayata sepenuhnya dikuasai aparat TNI-Polri, di mana aparat keamanan akan tetap hadir bagi masyarakat untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat ditempatkan yang aman, aparat tni dari Satgas Yonif 133 Yudha Sakti memberikan bantuan logistik berupa makanan dan dukungan pelayanan kesehatan bagi ratusan penduduk.

Pasukan TNI juga hingga saat ini masih terus memburu para kelompok KSTP dan membuat parameter pengamanan di sekitar wilayah perkampungan agar tidak disusupi oleh kelompok KSTP pimpinan Manfred fatem tersebut. ● han

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Tambahan Anggaran Alutista Sebaiknya Ditunda

JAKARTA (IM) - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah agar menunda tambahan alokasi anggaran untuk belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) sampai masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Menambah alokasi anggaran yang terjadi di tengah tahun politik riskan disalahgunakan.

"Koalisi menilai sebaiknya pemerintah menunda kenaikan anggaran pertahanan ini karena sarat akan potensi penyimpangan dan kepentingan politik yang dilakukan pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo," demikian keterangan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam keterangannya seperti dikutip pada Minggu (3/12).

"Kenaikan anggaran secara signifikan di Kementerian tertentu (Kementerian Pertahanan) yang dilakukan di tengah rendahnya akuntabilitas dan transparansi tentunya akan sangat potensial disalahgunakan," lanjut keterangan itu.

Penambahan alokasi anggaran belanja alutsista itu diungkapkan pada Selasa (28/11) lalu oleh

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani mengatakan, tambahan anggaran alokasi belanja alutsista di Kementerian Pertahanan (Kemena) untuk 2024 bersumber dari pinjaman luar negeri, yaitu sebesar USD 4 miliar atau setara dengan Rp 61,58 triliun.

Kenaikan ini baru disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa lalu.

Menurut koalisi sipil, kenaikan anggaran di Kemena terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis adalah tidak wajar. Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024.

Selain kekhawatiran disalahgunakan, koalisi sipil juga menilai sulit untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di tengah masa pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi saat ini Prabowo yang maju sebagai kandidat calon presiden dinilai tengah sibuk berkampanye ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan. ● han

29 Warga Afrika Ditangkap Petugas Imigrasi di Bandara Soetta

TANGERANG (IM) - Sebanyak 29 Warga Negara Asing (WNA) asal benua Afrika ditangkap petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta pada 29 November 2023.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, WNA itu diduga sering mengganggu ketertiban dan keamanan warga.

"Berkat aduan dari masyarakat, kami langsung lakukan koordinasi secara internal, juga dengan stakeholders, untuk segera menyelenggarakan operasi gabungan, karena lokasi laporan berada di wilayah kerja kami, tentunya kami harus segera menindaklanjuti," ujar Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Subki Muli.

Operasi digelar di salah satu apartemen yang berada di Cengkareng, Jakarta Barat. Dari 29 WNA yang diamankan, kesuluruhannya berasal dari benua Afrika. Yaitu 27 warga negara Nigeria, 1 warga negara Pantai Gading, dan 1

warga negara Ghana.

"Dari operasi gabungan tersebut, berhasil diamankan 29 WNA yang diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal, kelebihan masa tinggal atau overstay, hingga tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian yang sah, sampai saat ini tim kami masih melakukan pemeriksaan mendalam terkait kemungkinan pelanggaran lain yang terjadi," jelas Subki.

Operasi gabungan ini diselenggarakan sebagai bentuk perwujudan fungsi keimigrasian dalam hal pencegahan hukum dan menjaga keamanan negara. Masyarakat diminta untuk tidak ragu ataupun takut untuk melaporkan WNA yang diduga melakukan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya ke pihak berwenang. Sehingga kedaulatan negara dapat ditegakkan. ● mei



DZIKIR KEBANGSAAN BERSAMA YENNY WAHID

Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Yenny Wahid berbincang dengan santri saat silaturahmi dan Dzikir Kebangsaan di Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Desa Babakan, Kab. Tegal, Jateng, Minggu (3/11). Yenny Wahid menargetkan mayoritas suara pada Pemilu 2024 dari para santri untuk kemenangan Ganjar-Mahfud.



PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN HASIL PENGGABUNGAN USAHA

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk No. 27 tanggal 24 November 2023, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dan (ii) Akta Penggabungan No. 29 tanggal 24 November 2023, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang Pemberitahuan Penggabungan telah diterima dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0191240 tanggal 1 Desember 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021405.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 1 Desember 2023 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0149498 tanggal 1 Desember 2023 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0242650.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 1 Desember 2023, maka dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk mengumumkan bahwa terhitung sejak 1 Desember 2023, PT JHONLIN AGRO LESTARI ("Perusahaan Yang Menggabungkan Diri"), telah menggabungkan diri ke dalam PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk dan karenanya aktif dan pasiva Perusahaan Yang Menggabungkan Diri sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggabungan beralih karena hukum kepada PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan Yang Menggabungkan Diri berakhir karena hukum yang berlaku efektif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pengumuman ini disampaikan.

Tanah Bumbu, 4 Desember 2023
Direksi
PT Jhonlin Agro Raya Tbk

Gibran Ngaku Siap Debat Cawapres Tanpa Didampingi Capres Prabowo

JAKARTA (IM) - Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyebut bahwa debat calon wakil presiden (cawapres) dengan didampingi calon presiden (capres) di lokasi debat tak menguntungkan dirinya.

"Enggak (menguntungkan dirinya). Enggak menguntungkan siapa-siapa. Sama saja," ucap ketika ditanya wartawan setelah berkunjung ke Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (3/12).

Ia juga mengaku tidak masalah sendainya debat Pilpres 2024 tetap seperti 2019, di mana debat antara cawapres tidak didampingi oleh capres.

"Sama saja (didampingi atau tidak)," kata putra sulung Joko Widodo itu. Wali Kota Solo itu mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024, namun tak mengatakan lebih jauh bagaimana persiapannya sejauh ini.

Model debat kali berbeda dengan debat pada Pilpres sebelumnya. KPU RI mengubah format debat capres-cawapres sehingga berbeda dari Pilpres 2019. Pada Pilpres 2019, 5 kali debat capres-cawapres digelar dengan komposisi 1 kali debat khusus cawapres, 2 kali khusus capres, dan 2 kali dihadiri capres-cawapres.

Pada Pilpres 2024, sesuai UU Pemilu, ada 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Saat debat capres, cawapres turut mendampingi pasangannya. Demikian halnya saat debat cawapres.

Pembedaannya hanya proporsi bicara masing-masing capres dan cawapres, tergantung agenda debat hari itu,

apakah debat capres atau debat cawapres.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan, ketentuan itu diterapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerja sama masing-masing capres-cawapres bahu-membahu satu sama lain dalam penampilan debat.

"Sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah teamwork (kerja sama) antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (30/11).

Komisioner KPU RI, Idham Holik, membantah bahwa hal ini berarti pihaknya meniadakan debat capres maupun debat cawapres.

"Justru KPU menampilkan yang lebih baik agar masyarakat mendapatkan informasi yang jauh lebih utuh. Jadi di setiap debat itu, tergantung pada, debat kali ini untuk debat siapa? Kalau itu debatnya capres, maka aktor utamanya capres. Kalau debatnya cawapres, maka aktor utamanya adalah cawapres," kata Idham kemarin.

"Kita mesti ingat, yang namanya calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah calon dwitunggal," katanya menambahkan.

Konsep debat yang sejauh ini diberitakan masih berupa rencana hasil rapat dengan tim pasangan capres-cawapres pada Rabu (29/11) dan akan dimatangkan dalam rapat lanjutan beberapa waktu ke depan bersama tim pasangan capres-cawapres. ● han